

## KATA PENGANTAR

*“Buat apa sebuah Tahta dan menjadi Raja apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat.”* Kalimat pendek, penuh makna dan bernas dengan semangat pengabdian ini disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pidato Jumenengan pada 7 Maret 1969. Nampaknya, semangat untuk memberi manfaat kepada masyarakat serta keihlasan yang besarlah yang telah mendorong Sri Sultan untuk menempuh langkah yang amat berani pada tanggal 20 Mei 1998, mendorong arus Reformasi guna melawan arus Orde Baru.

Pada hari itu diperkirakan sejuta rakyat Yogyakarta dari segala tingkatan dan golongan, ikut serta dalam moratorium yang diadakan oleh pelajar dan mahasiswa. Guru, pegawai, buruh, rakyat jelata, semuanya tumpah ke jalan raya dan bergerak menuju Alun-alun Utara. Pelajar, mahasiswa dan rakyat Yogyakarta seolah-olah bersatu padu dan serempak berkumpul di tempat itu untuk mendapatkan arahan dan wejangan dari Sri Sultan yang oleh sebagian besar masyarakat Yogyakarta masih amat dihormati dan dicintai. Di mata mereka Sri Sultan bukan hanya seorang Gubernur dan Kepala Daerah, tetapi adalah seorang Raja.”. Peristiwa tersebut ditabalkan oleh koran-koran masyarakat Yogya sebagai “Gerakan Rakyat Yogyakarta”. Tapi ada juga yang menamakan kejadian ini “Aksi Damai”, “Reformasi Damai” atau “Aksi Damai Rakyat Yogyakarta”. Sebaliknya, koran-koran non-Yogya telah menabalkan

gerakan massa yang serentak tersebut dengan nama yang lebih padat makna, “Pisowanan Ageng”, “Pisowanan Agung” atau “Pasowanan Ageng”.

Peristiwa Gerakan Rakyat Yogyakarta atau Pasowanan Ageng ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari suasana kacau tak terkendali di ibukota Jakarta setelah gugurnya 6 orang Pahlawan Reformasi di Kampus Universitas Trisakti karena tembakan pasukan gelap pada 12 Mei 1998. Para mahasiswa melakukan moratorium politik menuntut pengunduran Presiden Suharto dan gerakan ini mencapai puncaknya dengan pendudukan Gedung MPR. Desakan rakyat yang dipelopori oleh para mahasiswa ini berhasil menurunkan Presiden Suharto pada 20 Mei 1998, bertepatan dengan Aksi Damai Rakyat Yogyakarta.

Karena peranan beliau yang amat besar dalam menentramkan hati rakyat dan mengobati kekecewaan mereka pada Pemerintah Orde Baru pada saat-saat yang paling kritikal tersebut, Sri Sultan telah diakui sebagai salah seorang dari 5 Tokoh Reformasi, dan satu-satunya tokoh yang dipandang masih bersih dari noda dan kesalahan karena tidak mampu melaksanakan Amanat Reformasi. Karena itulah, mulai banyak kelompok masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan mulai mengharapkan dan bahkan menginginkan agar suatu saat kelak, bila masanya telah tiba, beliau akan terpanggil untuk melakukan suatu yang bermanfaat buat rakyat Indonesia dengan secara langsung memimpin upaya meneruskan dan meluruskan semangat Reformasi.

Sejarawan Onghikham dalam karangannya berjudul “Renungan Sejarah atas Penobatan Hamengku Buwono X” telah mengupas kemungkinan tersebut. Dengan intusi sejarawannya yang tajam Ong menyimpulkan, karena peranan beliau yang besar pada negara, mulai dari dukungan terhadap Republik Indonesia pada 1945, dalam ikut mengatasi krisis PRR/Permesta dan krisis lainnya, Sri Sultan Hamengkubowono IX telah diterima sebagai tokoh nasional dan akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Putera beliau, Sultan Hamengkubuwono X, kata Ong, juga aktif dalam arena politik dan suatu saat dapat terpilih sebagai Gubernur DIY, dan ramalan ini sudah terjadi. Bila terjadi krisis politik dikemudian hari, Hamengku Buwono X diperlukan sebagai tokoh pemersatu dan stabilisator sebagai yang diperankan oleh Keluarga Norodom di Kamboja ataupun Raja Bhumibol di Muangthai. Melalui buku berjudul “Pisowanan Ageng” terbitan Forum Yogya ini kita dapat mengikuti peranan yang dimainkan oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam menghadapi krisis politik pada 1998 yang melengserkan Presiden Suharto.

Yogyakarta, 30 Agustus 2003

Sofian Effendi

Rektor

Universitas Gadjah Mada